

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK MENJADIKAN RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK

Mutia Eka Masputri, Al Rafni, Susi Fitria Dewi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Abstract

This article reveals how the Solok efforts in utilizing Smart House Elections as a means of political education. The purpose of this research is to; describe the efforts in making the smart house elections as a means of political and educational look at the obstacles faced FROM Solok in making smart house elections as a means of political education. This article uses a qualitative approach with a descriptive method. This article from the specified informant in purposive sampling to 7 informants include staff experts in ELECTION COMMISSION Solok, teachers, students, indigenous figures. Data type consists of primary and secondary data, in collected through interviews, observation and documentation. Test the validity of the data using triangulation of sources and triangulation techniques, data analysis time through reduction of data, data presentation, data interpretation and conclusion. The results showed that the efforts of the Solok makes smart house elections as a means of political education is; do official ELECTION COMMISSION through socialization Solok, doing school visits, conducted in cooperation with the Faculty of law University of Mahaputra Muhammad Yamin Solok and perform socialization to community leaders.

Keywords: *Political Education, Smart House Elections, Election Commission*

Abstrak

Artikel ini mengungkapkan bagaimana upaya KPU Kota Solok dalam memanfaatkan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk; mendeskripsikan upaya KPU dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan melihat kendala yang dihadapi KPU Kota Solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dari artikel ini ditentukan secara *purposive sampling* kepada 7 orang informan yang mencakup staf ahli di KPU Kota Solok, guru, mahasiswa, tokoh adat. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder, di kumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu ,teknik analisi data melalui reduksi data, penyajian data, interprestasi data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya KPU Kota Solok menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik adalah ;melakukan sosialisasi melalui web resmi KPU Kota Solok, melakukan kunjungan ke sekolah,melakukan kerjasama dengan fakultas hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok dan melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat.

Kata Kunci : *Pendidikan Politik, Rumah Pintar Pemilu, KPU*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perilaku pendidikan politik yang mudah diukur intensitasnya adalah partisipasi politik, antara lain melalui perhitungan persentase warga negara yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah warga negara yang berhak memilih. Partisipasi politik penting dalam menentukan kesuksesan sebuah Pemilu sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi dalam sebuah negara. Untuk meningkatkan partisipasi politik tersebut dapat dilakukan dengan pelaksanaan pendidikan politik yang optimal. Pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan pemilu.

Pelaksanaan Pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 membuktikan bahwa tingkat partisipasi pemilih belum mencapai target yang ditetapkan secara nasional yakni sebesar 77, 5%. Hal ini terlihat dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak pada 9 provinsi di Indonesia, seperti pada Tabel 1.1 berikut ini,

TABEL 1.1 Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Pemilih	Penggunaan Hak Pilih *	Tingkat Partisipasi	Pemilih Tidak Memilih
1	Provinsi Kalimantan Tengah	1.994.675	1.042.600	52,27%	47,73%
2	Provinsi Riau	1.234.535	682.534	55,29%	44,71%
3	Provinsi Sumatera Barat	3.545.076	2.079.063	58,65%	41,35%
4	Provinsi Kalimantan Utara	447.637	277.586	62,01%	37,99%
5	Provinsi Sulawesi Utara	1.985.879	1.274.622	64,18%	35,82%
6	Provinsi Kalimantan Selatan	2.897.057	1.921.946	66,34%	33,66%
7	Provinsi Bengkulu	1.450.414	969.068	66,81%	33,19%
8	Provinsi Jambi	2.483.426	1.660.093	66,85%	33,15%
9	Provinsi Sulawesi Tengah	1.996.754	1.392.113	69,72%	30,28%

Sumber: Rumah Pintar Pemilu KPU RI (diolah) *terdiri atas DPT, DPTb1 dan DPTb2

Selain pilkada gubernur dan wakil gubernur penulis juga mendapatkan angka partisipasi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota khususnya di Provinsi Sumatera Barat. seperti terlihat dalam Tabel 1.2 di bawah ini ;

TABEL 1.2. Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (dilihat dari angka golput tertinggi sampai dengan terendah)

No	Kabupaten /Kota	*Jumlah Pemilih	Penggunaan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi	Pemilih Tidak Memilih
1	Kabupaten Padang Pariaman	279.482	150.521	53,86%	46,14%
2	Kabupaten Agam	335.510	183.081	54,57%	45,43%
3	Kabupaten Tanah Datar	269.470	149.068	55,32%	44,68%
4	Kabupaten Solok	276.633	155.903	56,36%	43,64%
5	Kota Bukittinggi	74.450	43.823	58,86%	41,14%
6	Kabupaten Sijunjung	149.321	87.999	58,93%	41,07%
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	264.435	161.241	60,98%	39,02%
8	Kabupaten Pasaman Barat	255.226	160.580	62,92%	37,08%
9	Kabupaten Pesisir Selatan	314.755	203.202	64,56%	35,44%
10	Kabupaten Solok Selatan	113.534	76.810	67,65%	32,35%
11	Kabupaten Pasaman	190.712	133.047	69,76%	30,24%
12	Kota Solok	46.091	32.452	70,41%	29,59%
13	Kabupaten Dharmasraya	136.810	99.739	72,90%	27,10%

Sumber: Rumah Pintar Pemilu KPU RI (diolah) *terdiri atas DPT, DPTb1, DPPH dan DPTb2

Dari data yang penulis dapatkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kabupaten/kota yang mencapai target angka partisipasi secara nasional (77,5%)

sedangkan target partisipasi di Provinsi (dalam pelaksanaan Pilkada 2015 KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan target partisipasi sebesar 75%). tingkat partisipasi pemilih di Kota Solok 70,41% dengan pemilih yang tidak memilih sebesar 29,59.

Data diatas membuktikan bahwa pendidikan politik menjadi hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan untuk mencapai target angka partisipasi warga negara yang menggunakan hak pilihnya, sehingga keberhasilan demokrasi dapat terwujud. Untuk mewujudkan pendidikan politik yang baik dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi tersebut maka peran pemerintah khususnya badan penyelenggara pemilu harus ditingkatkan lagi. Menuntun warga negara menjadi pemilih yang sukarela, mandiri, rasional dan cerdas bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu warga negara harus diberi pengetahuan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran politiknya. Disinilah pentingnya peran KPU dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih karena dalam pendidikan pemilih, di dalamnya mencakup pemberian informasi kepiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. (Fitriani, 2018)

Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU)”

Sesuai Pasal 2 huruf g UU No 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus berpedoman pada asas keterbukaan. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang berasaskan keterbukaan adalah hak publik untuk memperoleh informasi atas penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (4) di tegaskan KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. KPU sebagai badan publik yang menyelenggarakan pemilu diwajibkan untuk mempublikasikan informasi kepiluan kepada publik.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama bagi KPU, sudah merupakan suatu kewajiban bagi KPU membangun komunikasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilu, dan pada akhirnya meningkatkan partisipasi pemilih, KPU mengaggas kegiatan pendidikan pemilih dengan pembuatan Rumah Pintar Pemilu.

Menurut buku pedoman pendidikan pemilih ada beberapa program dan strategi yang dikembangkan KPU dalam pendidikan politik seperti penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan media massa, pemanfaatan aktifitas sosial budaya, hadirnya Rumah Pintar Pemilu (RPP), adanya relawan demokrasi dan kreasi serta lain sebagainya.

Rumah Pintar Pemilu menyediakan berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Hal ini dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi, dan ruang diskusi. Selain untuk program pendidikan pemilih pada sisi lain RPP ini menjadi wadah bagi komunitas penggiat pemilu

dalam melahirkan gagasan pembaruan dan perbaikan proses politik dan demokrasi. Serta Rumah Pintar Pemilu dapat difungsikan menjadi semacam museum pemilu.

Rumah Pintar Pemilu memiliki target untuk menjadikan masyarakat cerdas dalam pemilu, yang mana ciri-ciri pemilih cerdas dalam pemilu itu adalah mampu menggali rekam jejak calon pemimpin yang ada. Rajin mencari informasi dan mempelajari program, visi misi yang ditawarkan pada masyarakat.

Edukasi kepada masyarakat merupakan target atau (output) yang harus dapat terwujud secara berkesinambungan sebagai bagian dari ikhtiar KPU untuk menciptakan pemilih yang cerdas dalam pemilu dan demokrasi. Untuk mewujudkan output tersebut pengelolaan RPP harus dirancang dengan optimal. KPU di setiap jenjang harus berkreasi dalam mengembangkan aktifitas didalamnya. Jadi tujuan Rumah Pintar Pemilu itu sendiri tidak lepas dari bagaimana masyarakat sadar akan pentingnya Pemilu sehingga dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

Hal ini sesuai dengan yang di katakan Devisi partisipasi masyarakat KPU Sumatera barat menyatakan pada pemilu pada tahun 2014 lebih dari 6 persen suara tidak sah, itu disebabkan kurangnya pengetahuan serta informasi tentang pemilu di masyarakat.

Sejak dirikan rumah pintar pemilu ini pada tahun 2015 sampai sekarang banyak rumah pintar pemilu yang masih sepi pengunjung, adapun masyarakat yang berkunjung dari lembaga sekolah, dan masyarakat yang berkunjung ke KPU endiri. Masyarakat individu yang memang niat utama untuk berkunjung ke rumah pintar pemilu ini sangat minim. Terlihat dari tidak adanya masyarakat umum yang datang atas ketertarikan dan penasaran dengan rumah pintar pemilu ini.

Program Rumah Pintar Pemilu ini merupakan program nasional yang telah disetujui oleh Bappenas. Tujuan dibuatkan Rumah Pintar Pemilu agar menghasilkan masyarakat yang melek akan politik. Rumah Pintar Pemilu nantinya akan menghasilkan pemilih yang melek politik, artinya mereka sudah tidak lagi buta akan politik. Dengan harapan mereka mau terlibat langsung dalam setiap tahapan pemilu atau setidaknya mau datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya dengan benar.

RPP juga sebagai pusat pendidikan politik dan informasi tentang pemilihan umum, RPP ini terbuka untuk masyarakat umum yang ingin mengerti apa itu politik demokrasi dan pemilu. RPP ini bisa kita jumpai di kantor Komisi Pemilihan Umum RI, kantor Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten atau kota diseluruh wilayah indonesia.

Berdasarkan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu tujuan Rumah Pintar Pemilu terbagi atas dua yaitu:

1. Tujuan umum

Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu menjadi pusat informasi kepemiluan

2. Tujuan khusus

Menedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara : memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi (pra pemilih),

meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen), menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen). Rumah Pintar Pemilu ini diharapkan dapat membantu dalam menekan potensi jumlah masyarakat yang tidak memilih karena ketidaktahuan masyarakat akan pemilihan umum.

Dalam situs Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan Selain itu menurut Muhammad Johan Komara, S.IP selaku Ketua KPU Kabupaten Bantul mengatakan, tujuan dari Rumah Pemilu didesain sebagai media pendidikan pemilih, yakni sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan serta sebagai wadah bagi komunitas pegiat pemilu dalam membangun gerakan, melahirkan gagasan pembaruan dan perbaikan proses politik dan demokrasi. (<http://mip.umy.ac.id/id/mip-umy-dan-kpu-bantul-kerjasama-dalam-launching-rumah-pintar-pemilu-omah-pemilu/di> akses tanggal 10 oktober 2018.)

Sasaran dari Rumah Pintar Pemilu adalah masyarakat umum dan seluruh segmentasi yang terdapat dalam masyarakat. Rumah Pintar Pemilu dapat di kunjungi oleh siapapun mulai dari masyarakat dan pelajar sebagai pemilih pemula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dan dokumentasi. Informan penelitian ini ada tujuh orang yang terdiri dari satu komisioner KPU yang menjabat dalam divisi Sumber Daya Masyarakat dan partisipasi masyarakat. satu kepala subbagian teknik dan hubungan masyarakat. satu devisi teknis, teknik analisis yang di gunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data uji keabsahan data yang di gunakan yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik melakukan berbagai upaya sebagai berikut;

1. Upaya KPU kota solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik.

- a. Melakukan sosialisasi melalui radio, selebaran-selebaran tentang rumah pintar pemilu kepada masyarakat dan juga memanfaatkan web KPU Kota Solok.

kpu kota solok memiliki web untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU. Di web tersebut masyarakat bisa melihat informasi yang di suguhkan oleh KPU mengenai pemilu dan pendidikan politik.. Selain melalui web KPU juga menyebarkan selebaran-selebaran mengenai rumah pintar pemilu adapun kpu kota solok juga melakukan sosialisasi di radio citra FM, KPU melakukan sosialisasi ini lebih dari 10 kali dalam setahun

- b. Melakukan kunjungan (visit) kesekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pemilu.

Upaya KPU kota solok dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU melakukan kunjungan ke sekolah sekolah mulai dari sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas/kejuruan (SMA SMK) dan perguruan

tinggi. , program ini di lakukan KPU untuk memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi yang merupakan pemilih pemula untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu, memberi kesadaran politik atau memberikan pendidikan politik kepada. Sejauh ini kpu kota solok telah melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pemilihan umum, selain kpu mengunjungi sekolah ada juga sekolah yang berkunjung ke KPU tepatnya rumah pintar pemilu . sekolah yang pernah berkunjung ke rumah pintar pemilu ini berasal dari sekolah golden school dan juga mahasiswa fakultas hukum universitas mahaputra muhammad yamin kota solok. Hal ini senada dengan yang di katakan oleh ketua KPU RI bapak arif budiman :

“Sebenarnya aktifitas dari rumah pintar pemilu ini ada dari dua arah, orang-orang datang kesitu lalu belajar. Atau kpu yang punya banyak informasi, bahan baku sosialisasi juga bisa jemput bola.”
<https://radarmalang.id/kpu-bakal-bentuk-rumah-pintar-pemilu-efektif-nggak-ya/>

- c. Melakukan kerjasama dengan fakultas hukum UMMY solok sehingga mahasiswa dapat belajar banyak dan melakukan penelitian atau studi tentang kepemiluan.

Kerjasama yang terkait dengan: 1. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada; 3. Pelaksanaan magang mahasiswa; 4. Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang “rumah pintar pemilu bareh solok”; 7. Penyebarluasan informasi tentang agenda besar nasional pemilu serentak 2019; 8. Kegiatan-kegiatan lain yang di sepakati secara bersama-sama.

- d. Melakukan sosialisasi pemilu 2019 kepada tokoh masyarakat.

Kpu kota solok melaksanakan sosialisasi tentang persiapan pemilu tahun 2019 kepada ketua dan pengurus LKAAM kota solok, ketua dan pengurus bundo kanduang se-kota solok, tokoh masyarakat angku-angku, niniak mamak, cadiak pandai, serta kapolres solok kota beserta jajaran.

2. Kendala Yang Di Hadapi KPU kota solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik.

- a. Kpu kota solok belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memang menguasai Rumah Pintar Pemilu

Mengingat setiap pengunjung yang datang ke rumah pintar pemilu tidak ada petugas yang secara khusus di tunjuk untuk menjelaskan mengenai rumah pintar pemilu ini kepada pengunjung, jadi sejauh ini tidak ada petugas yang menjelaskan secara detail mengenai rumah pintar pemilu ini. Sehingga tidak banyak informasi yang di dapatkan oleh pengunjung rumah pintar pemilu ini.

- b. Anggaran

Anggaran yang masih kurang dari pemerintah daerah menjadi salah satu kendala KPU kota solok dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun non fisik di kantor, dan berimbas kepada sarana dan prasarana

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di dapatkan upaya KPU kota solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik

- a. Melakukan sosialisasi melalui radio, selebaran-selebaran tentang rumah pintar pemilu kepada masyarakat dan juga memanfaatkan web KPU Kota Solok.
- b. Melakukan kunjungan (visit) kesekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pemilu.
- c. Melakukan kerjasama dengan fakultas hukum UMMY solok sehingga mahasiswa dapat belajar banyak dan melakukan penelitian atau studi tentang kepemiluan.
- d. Melakukan sosialisasi pemilu 2019 kepada tokoh masyarakat.

Dalam menjalankan upaya- upaya tersebut adalah kendala-kendala yang di hadapi KPU mulai dari SDM dan anggaran yang KPU dalam menjalankan upaya-upaya kpu terkendala dalam kurangnya SDM.

SARAN

Rumah pintar pemilu merupakan salah satu sarana dalam pendidikan politik bagi masyarakat, oleh karena itu perlu di dukung oleh semua pihak untuk merealisasikan hal ini mulai dari pihak penyelenggara dan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, L. (2009). *pilkada dan dinamika politik lokal*. pustaka pelajar.
- Budianto, R. (2017). eJournal Ilmu Pemerintahan. *Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda.*, hal. 93-106.
- Budiarjo, M. (1998). *partisipasi dan partai politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Fitriana, Q. (2018). kajian moral dan kewarganegaraan. *upaya KPU kabupaten gresik untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui rumah pintar pemilu raden paku*, hal. 414-428.
- kartono, k. (2009). *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Rusadi, K. (2004). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Sendhikasari, D. (2015, Desember). Buletin Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri. *pilkada serentak 2015 dan agenda good governance*.
- Simanjuntak, N. (2017). Jurnal Bawaslu. *PEMANTAUAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU*, hal. 305-321.
- Surbakti. (2016). *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan*. surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Zaman, R. K. (2016). *perjalanan panjang pilkada serentak*. jakarta: mizan publika.
- <http://mip.umy.ac.id/id/mip-umy-dan-kpu-bantul-kerjasama-dalam-launching-rumah-pintar-pemilu-omah-pemilu/di> akses tanggal 10 oktober 2018.